

BAB VII

PENUTUP

VII.1. Kesimpulan

Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan mencakup: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam RPJMD dan RPJPD secara umum telah selaras.
2. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN (NAWACITA) cukup baik, namun ada beberapa substansi Nawacita yang belum termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, serta melakukan revolusi karakter bangsa.
3. RPJMD dengan UU 23/2014 belum sepenuhnya selaras terutama berkaitan dengan nomenklatur, jumlah, pembagian urusan, dan kewenangan urusan pemerintahan.
4. RPJMD belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN.
5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD telah selaras dengan pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan tahun 2015 terlihat dari prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD.
6. Program dalam RPJMD secara umum selaras dengan RKPD namun pada tahun 2014 terdapat 1 program dan pada tahun 2015 terdapat 2 program yang terintegrasi dengan program lain.
7. Status capaian indikator RPJMD per misi yang tercapai 36,44% (43 indikator), yang akan tercapai 46,61% (55 indikator), dan perlu upaya keras 16,10% (19 indikator) serta 0,85% (1 indikator) belum diketahui status pencapaiannya.
8. Status capaian indikator RPJMD per urusan yang tercapai 34,57% (149 indikator), yang akan tercapai 47,33% (204 indikator), dan perlu upaya keras 18,10% (78 indikator).
9. Perlu dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dikarenakan: menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional, terbitnya peraturan perundang-undangan baru, tidak tercapainya target akhir (rata-rata capaian kinerja saat ini secara progresif tahunan tidak mampu untuk memenuhi target akhir, kesalahan penetapan target akumulatif yang terlalu optimis).

VII.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD (s/d triwulan III tahun 2015), direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dipertimbangkan masukan dari SKPD antar lain berkaitan dengan penyempurnaan formulasi kata/kalimat, tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi, indikator, dan target kinerja;
2. Target akhir RPJMD untuk beberapa indikator yang kemungkinannya tidak akan tercapai perlu dipertimbangkan untuk dilakukan

penyesuaian dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta amanat regulasi;

3. Penyesuaian/Perubahan target akhir RPJMD dikarenakan memperhatikan ketercapaian kinerja capaian saat ini dan perkiraan kemampuan untuk mencapai target indikator yang disesuaikan/diubah, perlu diikuti dengan penyesuaian indikasi pendanaan secara rasional serta memperhitungkan kemampuan keuangan daerah;
4. Indikator-Indikator utama yang akan digunakan dalam pencapaian visi sejahtera, yaitu:

A. Pangan

- 1) Ketersediaan pangan utama;
- 2) Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah;
- 3) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- 4) Persentase penanganan daerah rawan pangan;
- 5) Jumlah produksi padi (Juta Ton);
- 6) Jumlah produksi tebu (Juta Ton);
- 7) Jumlah produksi daging (Juta Kg);
- 8) Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Keahlian;
- 9) Tingkat konsumsi ikan.

B. Kesehatan

- 1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH);
- 2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH;
- 3) Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 KH;
- 4) Angka Kematian DBD (%);
- 5) Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk);
- 6) Persentase DO KB;
- 7) Persentase *Unmet Need*;
- 8) Persentase *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR);
- 9) Penyediaan Jamkesda.

C. Pendidikan

- 1) Angka rata-rata lama sekolah;
- 2) APK SMA/SMALB/MA/Paket C;
- 3) Angka kelulusan SMA/SMALB/MA/SMK;
- 4) Persentase ruang kelas SMA/SMALB/MA/SMK sesuai SNP;
- 5) Persentase SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi;
- 6) Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4;
- 7) Penyediaan Bea Siswa Miskin (BSM);
- 8) Jumlah desa vokasi yang dikembangkan;
- 9) Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemasyarakatan.

D. Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja

- 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 2) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
- 3) Jumlah AKAN (orang);
- 4) Produktivitas tenaga kerja;
- 5) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja;

- 6) Jumlah kewirausahaan pemuda.
- E. Air Bersih
 - 1) Persentase cakupan layanan air minum perkotaan;
 - 2) Persentase cakupan layanan air minum perdesaan.
- F. Rumah Layak Huni
 - 1) Persentase cakupan layanan sanitasi;
 - 2) Rasio rumah layak huni.
- G. Perlindungan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial
 - 1) Persentase penanganan konflik sosial;
 - 2) Kondusivitas daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) Persentase penanganan PMKS;
 - 4) Persentase penguatan kapasitas PSKS.
- H. Hubungan Sosial Masyarakat
 - 1) Meningkatnya peran masyarakat/sikap toleransi dan gotong royong;
 - 2) Persentase pelaksanaan rembug masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- I. Akses Terhadap Informasi
 - 1) Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi;
 - 2) Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa.
5. Indikator-Indikator utama yang akan digunakan dalam pencapaian visi Berdikari, yaitu:
 - A. Berlandaskan dengan membangun berdasarkan kekuatan yang ada melalui eksplorasi seluruh potensi IPTEK, kearifan lokal, SDA-LH, SDM, kerjasama
 - 1) Produksi padi (ton);
 - 2) Produksi jagung (ton);
 - 3) Produksi Keledai (ton);
 - 4) Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara;
 - 5) Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara;
 - 6) Nilai ekspor non migas;
 - 7) Jumlah UED-SP yang aktif;
 - 8) Jumlah produk komoditas OVOP.
 - B. Berlandaskan dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat (peningkatan keterampilan, pengetahuan, peluang dan pengembangan diri masyarakat)
 - 1) Jumlah SDM KUMKM yg terlatih;
 - 2) Jumlah penyelenggaraan bimbingan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat;
 - 3) Jumlah sarjana penggerak pembangunan perdesaan;
 - 4) Jumlah kewirausahaan pemuda;
 - 5) Pengembangan kelembagaan usaha industri.
 - C. Berlandaskan dengan tercapainya daya saing kompetitif (keunggulan SDA, SDM, Sarpras Pembangunan, pemerintahan dan pelayanan merata)
 - 1) Rasio Elektrifikasi (%);
 - 2) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik;

- 3) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 - 4) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku;
 - 5) Terfasilitasnya pembangunan infrastruktur strategis;
 - 6) Jumlah UPP yang dilakukan pengukuran IKM;
 - 7) Prosentase pelayanan perijinan dan non perijinan;
 - 8) Tersedianya informasi peluang usaha;
 - 9) Ketersediaan harga jenis komoditas bahan pokok;
 - 10) Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total konsumsi energi.
6. Indikator yang perlu dihilangkan/hapus antara lain rinciannya seperti pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Yang Akan Dihilangkan/Hapus

INDIKATOR	ALASAN
IGI	❑ IGI bukan merupakan indikator yang digunakan dalam RPJMN 2015-2019, melainkan indikator yang diukur oleh organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan, dan tidak diukur setiap tahun. ❑ IGI dihilangkan dari indikator RPJMD 2013-2018, sebagaimana hasil konsultasi tertulis dengan Bappenas. (Surat Direktur Aparatur Negara Bappenas No. 4681/Dt.2.4/07/2015 tanggal 28 Juli 2015)
RSBI	❑ Kebijakan Nasional Sudah Tidak Di Berlakukan Lagi, dikembalikan kepada kurikulum 2013.

7. Indikator yang mengalami perubahan target antara lain rinciannya seperti pada tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Yang Mengalami Perubahan Target

NO	INDIKATOR	CAPAIAN s.d. Tw III	TARGET AKHIR RPJMD	PENYESUAIAN/ PERUBAHAN (Akhir 2018)	PENJELASAN
1	Jumlah Penduduk miskin	13,58%	7,8-7,6%	9,93%-10,4%	a. Tren Penurunan b. Target RPJMN c. Kondisi Perekonomian Nasional dan Global
2	Pertumbuhan Ekonomi	5%	6,2%-6,7%	5,8%-6,2%	Penyesuaian dengan Kondisi Perekonomian Global dan Nasional.
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	53,60%	60%	62,50%	Adanya pencaanangan pembangunan 1000 embung. (Kenaikan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)
4	AKI	437 Kasus	116 per 100.000 KH	2017 (126); 2018 (125)	Mengacu pada target AKI tingkat Nasional yaitu 306 per 100.000 KH di tahun 2019 maka diperkirakan target pada RPJMD tidak akan tercapai. (Kenaikan angka target ini negatif karena menurunkan kinerja pembangunan)

NO	INDIKATOR	CAPAIAN s.d. Tw III	TARGET AKHIR RPJMD	PENYESUAIAN/ PERUBAHAN (Akhir 2018)	PENJELASAN
5	AKABA	4.258 Kasus	11 per 1.000 KH	2017 (12,8); 2018 (12,6)	Angka Kematian Balita cenderung tinggi karena dipengaruhi capaian angka kematian ibu yang sulit tercapai. (Kenaikan angka target ini negatif karena menurunkan kinerja pembangunan)
6	Angka Kesakitan DBD	41,27	<20	2017 (>48); 2018 (>47)	Adanya perbedaan perhitungan dengan pemerintah pusat sehingga perlu penyesuaian target angka kesakitan DBD yang mengacu pada Dokumen RPJMN. (Kenaikan angka target ini negatif karena menurunkan kinerja pembangunan)
7	Angka Kematian DBD	1,82%	<1	2017 (<2) 2018 (<2)	1. Mendasarkan RPJMN 2015-2019 untuk kematian DBD tidak dijadikan indikator makro bid kesehatan shg direkomendasikan untuk dipindahkan pada indikator Bab VIII; 2. Pencapaian target untuk penanganan DBD masih sulit untuk tercapai dikarenakan virulensi virus semakin kuat dan belum ada obat untuk virus dengue. (Kenaikan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)
8	Rasio Elektrifikasi (%)	89,29	92,12	94	Adanya pengembangan/pembangunan pembangkit listrik baru yang telah operasional serta kegiatan pembangunan jaringan listrik pedesaan di daerah terpencil, dana bantuan listrik murah untuk masyarakat yang tidak mampu. (Kenaikan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)
9	SKOR PPH	99,15	92,23	87	Penggunaan metode survey yang menggunakan konsumsi pangan rill menjadi data konsumsi susenas hasil justifikasi dengan pendekatan pengeluaran (2016). Metode perhitungan menggunakan tahun dasar yang berbeda. (Penurunan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)

NO	INDIKATOR	CAPAIAN s.d. Tw III	TARGET AKHIR RPJMD	PENYESUAIAN/ PERUBAHAN (Akhir 2018)	PENJELASAN
10	Opini BPK (WTP)	Provinsi dan 10 Kab/Kota	Provinsi dan 35 Kab/Kota	60 % WTP untuk Kabupaten dan 65 % untuk Kota	Mengacu pada sasaran pokok pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 (Penurunan angka target ini positif karena meningkatkan kinerja pembangunan)

8. Indikator yang atribut pembentuknya perlu direvisi, antara lain:

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1) Perubahan pada indikator

Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik:

- Dengan memasukan Harapan Lama Sekolah sehingga didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB (produk Nasional Bruto) perkapita menggantikan PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah.

2) Perubahan pada metode penghitungan

Metode Perhitungan Agregasi diubah dari rata-rata Arimatik diubah menjadi Rata-rata Geometrik, yang diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik ketiga dimensi (Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi) harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

B. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

1) Dasar Pertimbangan

Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan adopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008-System of National Accounts* (SNA-2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

2) Perubahan Sektor Ekonomi

- Semula :
9 Sektor Ekonomi yaitu: Pertanian; Pertambangan dan Galian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perush; dan Jasa-jasa.
- Menjadi :
17 Sektor Ekonomi yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Gas; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan

Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

3) Manfaat

- Menginformasikan perekonomian nasional dan regional terkini, seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.